KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Duka karhutla Bromo, DPR minta utamakan keselamatan petugas
Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 19

Duka Karhutla Bromo

DPR Minta Utamakan Keselamatan Petugas


FOTO: DPR.GO.ID

Dini Rahmania

SENAYAN menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya empat orang petugas dalam upaya pemadaman kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis (15/10/2026).

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania mengatakan, empat nyawa yang hilang tidak boleh dianggap sebagai risiko dalam penanganan bencana. Di balik peristiwa ini, ada keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka berangkat untuk membantu menyelamatkan lingkungan dan masyarakat, tetapi harus kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas kemanusiaan. "Ini sungguh menyakitkan dan menjadi duka kita bersama," ujar Dini di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Sebelumnya, empat orang meninggal saat menjalankan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur (Jatim), pada Kamis (15/10/2026). Sedangkan dua orang lainnya mengalami luka bakar dan masih menjalani penanganan medis secara intensif.

Mereka yang meninggal dunia adalah, Sukaris, Operator layanan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Balai Besar TNBTS, Hendra Rony Wagiyanata, Petugas Balai Besar TNBTS (meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan medis karena luka bakar). Kemudian, Wisnu Yuda Pratama, Petugas sekuriti hotel (Artotel Bromo), Sefriel Ardiansyah, Petugas sekuriti hotel (Artotel Bromo) sekaligus atlet panjat tebing.

Para korban terjebak oleh kepulan asap pekat dan perubahan arah angin di area Bukit Mentigen, Kabupaten Probolinggo, Jatim saat berjibaku memadamkan api bersama tim gabungan.

Dini Rahmania melanjutkan, pihaknya mendesak instansi terkait mengambil langkah penanganan yang lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi. Jangan sampai keterbatasan sarana, lemahnya antisipasi, atau keterlambatan penanganan kembali membahayakan mereka yang berada di garis depan. Hal ini berlaku untuk semua penanganan bencana yang ada di Indonesia.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem komando, pemetaan risiko, dan mekanisme penyelamatan darurat. "Jika ditemukan kelalaian dalam penerapan standar keselamatan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas," tandas politisi Nasdem ini.

Dini mengingatkan, Pemerintah wajib memastikan santunan, pemenuhan hak keluarga korban meninggal dunia, serta perawatan dan pemulihan terbaik bagi korban luka. Keberanian petugas atau relawan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan mereka. Karena mereka berada di garis depan untuk melindungi semua orang, maka negara mesti hadir melindungi mereka.

"Tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang karena lemahnya kesiapsiagaan dan perlindungan di lapangan," kata legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini mengingatkan. ■ TIF